Pemerintah Kabupaten Nganjuk

bpkad KAB.NGANJUK

HAN DAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/2025 Tgl 16 Juni 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/350/K/411013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembatani rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

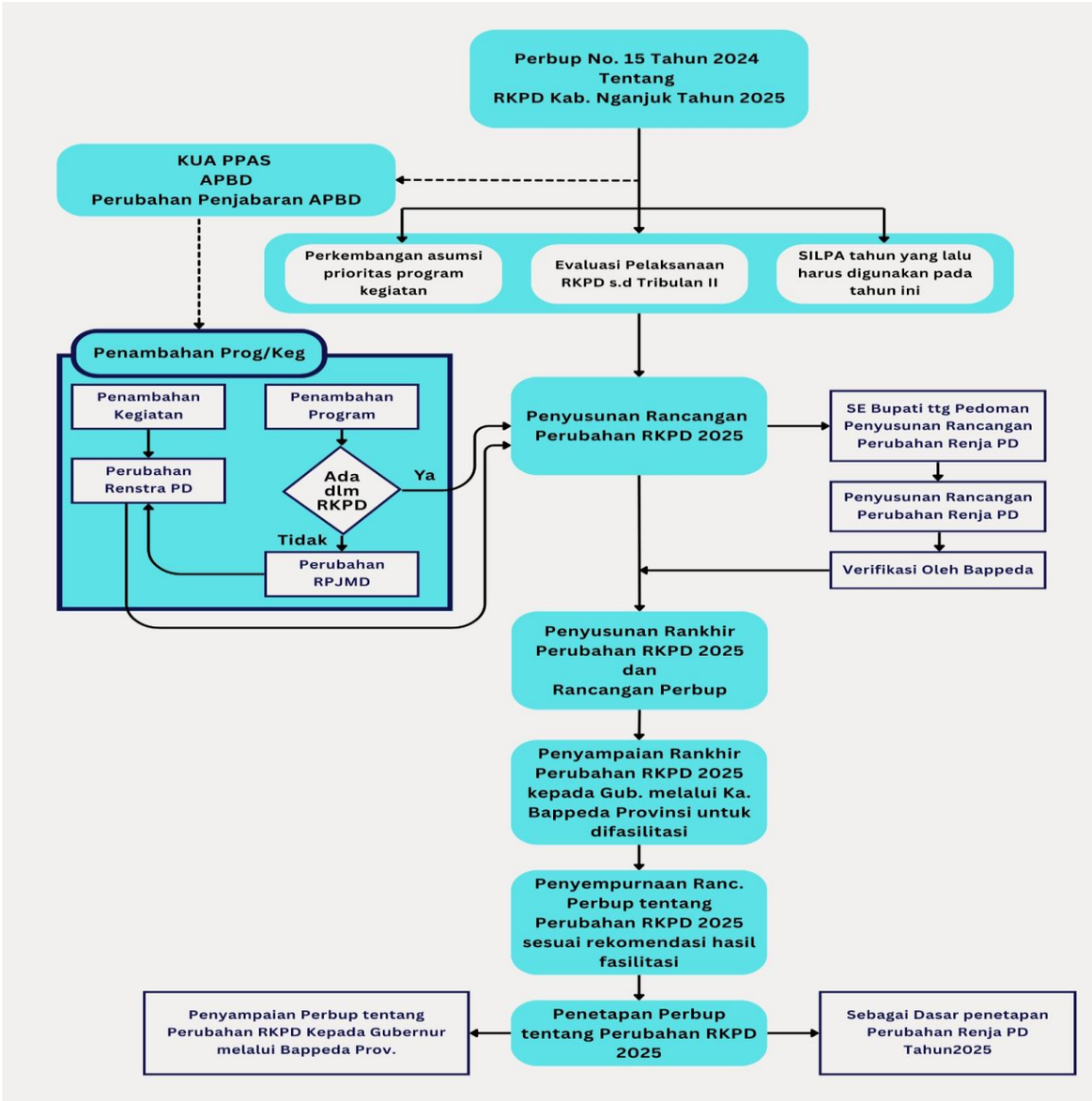
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:.

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 100.3.4.2/189/411.000/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap dinamika perkembangan keadaan selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD s/d Triwulan I Tahun 2025

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					**Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**2**				**Bidang Urusan Keuangan**									
5	**2**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPKAD**	**86**	**80**	**82**	**80 %**	**98%**	**82**	**-**	**-**
5	**2**	**1**	**02.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100% %**	**100%**	**100%**	**38 %**	**35%**	**100%**	**%**	
5	2	1	02.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dok	5 dok	5 dok	1 dok	20%	5 dok	11 dok	73%
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	2 dok	67%
5	2	1	02.01	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	2 dok	67%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.01	4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	2 dok	67%
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	25%	4 laporan	9 laporan	75%
5	2	1	02.01	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	9 laporan	56%
5	**2**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100% %**	**71%**	**100%**	**80 %**	**85%**	**100%**	**81 %**	
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 org/bl	46 org/bl	46 org/bl	46 org/bl	100%	46 org/bl	138 org/bl	100%
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	51 laporan	17 laporan	17 laporan	4 laporan	24%	17 laporan	38 laporan	75%
5	**2**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang disusun**	**100% %**	**40%**	**100%**	**50 %**	**100%**	**100%**	**51 %**	
5	2	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan	5 laporan	83%
5	**2**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat**	**100% %**	**49%**	**75%**	**- %**	**215%**	**75%**	**1 %**	
5	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	0 -	60 paket	0 -	0%	60 paket	60 -	3000%
5	2	1	02.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 org	150 org	150 org	0 org	0%	150 org	300 org	67%
5	2	1	02.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	450 org	166 org	150 org	0 org	0%	150 org	316 org	70%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**2**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum**	**Persentase fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**100% %**	**53%**	**90%**	**27 %**	**76%**	**90%**	**28 %**	
5	2	1	02.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	7 paket	233%
5	2	1	02.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	5 paket	1 paket	0 paket	0%	1 paket	6 paket	200%
5	2	1	02.06	4	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	3 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	10 paket	333%
5	2	1	02.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	2 paket	1 paket	0 paket	0%	1 paket	3 paket	100%
5	2	1	02.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dok	2 dok	3 dok	0 dok	0%	3 dok	5 dok	56%
5	2	1	02.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 laporan	4 laporan	10 laporan	1 laporan	10%	10 laporan	15 laporan	50%
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108 laporan	70 laporan	36 laporan	5 laporan	14%	36 laporan	111 laporan	103%
5	2	1	02.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	600 dok	200 dok	200 dok	60 dok	30%	200 dok	460 dok	77%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.06	11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 -	1 -	2 -	0 -	0%	2 -	3 -	50%
5	**2**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100% %**	**100%**	**100%**	**-** **%**	**114%**	**100%**	**2 %**	
5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	345 unit	8 unit	10 unit	0 unit	0%	10 unit	18 unit	5%
5	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	132 unit	6 unit	10 unit	0 unit	0%	10 unit	16 unit	12%
5	**2**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100% %**	**100%**	**100%**	**14 %**	**115%**	**100%**	**16 %**	
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	9 laporan	3 laporan	3 laporan	1 laporan	33%	3 laporan	7 laporan	78%
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	12 laporan	36 laporan	3 laporan	8%	36 laporan	51 laporan	47%
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	12 laporan	27 laporan	75%
5	**2**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang dipelihara**	**100% %**	**100%**	**100%**	**38 %**	**120%**	**100%**	**40 %**	

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	57 unit	19 unit	19 unit	11 unit	58%	19 unit	49 unit	86%
5	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	1 unit	10 unit	1 unit	10%	10 unit	12 unit	40%
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	36 unit	10 unit	3 unit	30%	10 unit	49 unit	163%
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	2 unit	67%
5	**2**	**2**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar**	**100% %**	**62%**	**100%**	**3 %**	**100%**	**100%**	**4 %**	
5	**2**	**2**	**02.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD) yang disusun tepat waktu**	**100% %**	**84%**	**100%**	**0 %**	**100%**	**100%**	**2 %**	
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	6 dok	1 dok	2 dok	0 dok	0%	2 dok	3 dok	50%
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	6 dok	1 dok	2 dok	0 dok	0%	2 dok	3 dok	50%
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	6 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	5 dok	83%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Jumlah Perda tentang P.APBD dan Perkada tentang Penjabaran P. APBD	15 dok	4 dok	5 dok	0 dok	0%	5 dok	9 dok	60%
5	2	2	02.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 -	0 -	208 org	0 -	0%	208 org	208 -	#DIV/0!
5	**2**	**2**	**02.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100% %**	**57%**	**100%**	**13 %**	**71%**	**100%**	**14 %**	1422%
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	27000 dok	9033 dok	9000 dok	1137 dok	13%	9000 dok	19170 dok	71%
5	2	2	02.02	3	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	624 dok	208 dok	208 dok	104 dok	50%	208 dok	520 dok	83%
5	2	2	02.02	5	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	276 dok	169 dok	92 dok	11 dok	12%	92 dok	272 dok	99%
5	2	2	02.02	6	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga	3 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	2 dok	67%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						keuangan bank dan bukan bank								
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D instansi terkait	1950 dok	871 dok	650 dok	2 dok	0%	650 dok	1523 dok	78%
5	2	2	02.02	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	15 dok	18 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	28 dok	187%
5	**2**	**2**	**02.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100% %**	**60%**	**100%**	**1 %**	**100%**	**100%**	**219% %**	
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	33 dok	11 dok	11 dok	0 dok	0%	11 dok	22 dok	67%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.03	3	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0%	4 laporan	8 laporan	67%
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	5 dok	83%
5	2	2	02.03	6	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dok	1 dok	0 dok	0 dok	#DIV/0!	0 dok	1 dok	33%
5	2	2	02.03	7	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	6 dok	2 dok	2 dok	0 dok	0%	2 dok	4 dok	67%
5	2	2	02.03	11	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	450 org	150 org	150 org	0 org	0%	150 org	300 org	67%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**2**	**2**	**02.04**		**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan**	**100% %**	**83%**	**100%**	**- %**	**100%**	**100%**	**2 %**	
5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	18 laporan	4 laporan	6 laporan	0 laporan	0%	6 laporan	10 laporan	56%
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah penyaluran dana darurat dan mendesak yang dilaksanakan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0%	4 laporan	8 laporan	67%
5	2	2	02.04	10	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran belanja bagi hasil Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0%	2 laporan	4 laporan	67%
5	**2**	**2**	**02.05**		**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100% %**	**58%**	**100%**	**- %**	**24%**	**100%**	**2 %**	
5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	300 org	100 org	100 org	0 org	0%	100 org	200 org	67%
5	**2**	**3**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100% %**	**74%**	**100%**	**31 %**	**107%**	**100%**	**33 %**	
5	**2**	**3**	**02.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100% %**	**74%**	**100%**	**31 %**	**107%**	**100%**	**33 %**	

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) Triwulan I Tahun (2025)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	156 dok	52 dok	52 dok	30 dok	58%	52 dok	134 dok	86%
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	156 dok	52 dok	52 dok	0 dok	0%	52 dok	104 dok	67%
5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	3 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	2 dok	67%
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	156 laporan	52 laporan	52 laporan	52 laporan	100%	52 laporan	156 laporan	100%
5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	156 laporan	52 laporan	52 laporan	0 laporan	0%	52 laporan	104 laporan	67%
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil pengamanan BMD	12 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	25%	4 laporan	9 laporan	75%
5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	90 laporan	30 laporan	30 laporan	0 laporan	0%	30 laporan	60 laporan	67%
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	78 dok	26 dok	26 dok	0 dok	0%	26 dok	52 dok	67%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat Ketercapaian
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat Ketercapaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	93,7%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Dukungan dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Dukungan dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pengelola Aset Daerah dalam penatausahaan aset daerah	-

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran Stragetis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi	
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Opini BPK terhadap LKPD	100%	100%	100%	93,7%	100%	100%
2.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) BPKAD Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan BPKAD secara umum telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra 2024-2026.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Pengelola keuangan dan aset daerah belum mempunyai pengetahuan yang memadai dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Pemahaman terkait tupoksi dan jumlah tenaga pengelola keuangan di SKPD masih kurang, sehingga pengelola keuangan di SKPD harus merangkap tugas yang bukan menjadi tupoksinya.
c. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb).
d. Sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah karena pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan proses yang saling terkait dan harus melibatkan beberapa pihak (antara lain BPN, desa/kelurahan, kecamatan, tetangga, dan ahli waris). Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan anggaran

Tujuan Pembangunan Kabupatan Nganjuk sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2046 adalah **"MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK"** dan sasarannya adalah **"MENINGKATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF, SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA".** Untuk itu, BPKAD mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dengan meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.5
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2025

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Catatan Penting
				Target*)	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		
2.	Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persentase	17.82 %	14.23 %	14.98%	19.50 %		19.80 %		

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2024

*) Rencana (anggaran setelah perubahan)

Berkenaan dengan tugas dan fungsi BPKAD memberikan kontribusi terhadap tujuan ke-16

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Nganjuk, ada beberapa hal yang diharapkan oleh BPKAD dalam kurun waktu tiga tahun kedepan yaitu :

1. **Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis kinerja**

   Adanya paradigma baru dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah maka diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia yang profesional dengan integritas tinggi dalam menangani pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

   Diharapkan dalam tiga tahun kedepan di setiap SKPD telah terpenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan Ekonomi terutama Akuntansi untuk mempertahankan target Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan mendapat opini BPK ”**Wajar Tanpa Pengecualian**”. Faktor kunci untuk memperoleh predikat WTP dari BPK adalah meningkatnya pemahaman sumber daya pengelola keuangan dan mengimplementasikan dalam mengelola dokumen sumber keuangan, mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. **Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

   Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah sebagai sarana dan prasarana penunjang Kinerja Pemerintah di Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun kebijakan strategis untuk tiga tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk yaitu peningkatan pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi elektronifikasi yang meliputi siklus pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

   Dalam hal ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standardisasi harga.

b. Pengadaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.

c. Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran

   Dalam hal ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.

d. Penggunaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai status penggunaan barang milik daerah baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi.

e. Penatausahaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris

Barang serta sistem pelaporan.

f. Pemanfaatan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam hal ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang.

h. Penilaian

Dalam hal ini mengatur mengenai penilaian barang milik daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian barang milik daerah.

i. Penghapusan

Dalam hal ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar barang milik daerah.

j. Pemindahtanganan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam hal ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

l. Pembiayaan

Dalam hal ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Rencana untuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah.

2.3.4 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

- Belum adanya kemandirian fiskal sehingga dalam penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan masih terkendala terkait pagu anggaran daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penguatan komitmen serta kapasitas sumber daya manusia, pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan dan implementasi standar pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi;
- Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya;
- Belum terklasternya persyaratan pengajuan sertifikat aset milik Pemda sepertiprogram PTSL ;
- Belum tertibnya persyaratan untuk pensertifikatan tanah-tanah SD yang menempati TKD;
- Membentuk Tim khusus IT mempermudah untuk koordinasi dengan bank bilamana ada gangguan teknis/jaringan SIPD;
- Adanya sosialisasi terkait produk di KKPD OPD

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural”.**

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.6
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk**	**Nilai SAKIP**	**84**	**7.348.424.695**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Kab. Nganjuk**	**Nilai SAKIP**	**82**	**7.578.673.504**	
I.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**54.567.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**45.319.200**	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.185.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	7.290.000,00	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.639.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.562.000,00	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.639.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	6.639.000,00	
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.457.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.860.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.457.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	4.833.200,00	
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	9.276.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	6.350.000,00	
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	10.914.000,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	9.785.000,00	
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.419.047.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.535.599.483**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	5.405.406.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	5.524.062.833,00	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.639.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.129.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	6.002.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	4.407.650,00	
III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun**	**2 laporan**	**10.831.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun**	**2 laporan**	**9.891.000,00**	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	10.831.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	9.891.000,00	
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**200.801.950**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**205.521.050**	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 orang	33.300.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60	0	
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	76.287.950,00	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	38.143.750,00	
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	91.214.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	167.377.300,00	
V.	**Administrasi Umum**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang**	**100%**	**405.903.422**	**Administrasi Umum**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang**	**100%**	**285.243.648**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dilaksanakan perangkat daerah					**dilaksanakan perangkat daerah**			
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.218.892,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.218.892,00	
2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.872.400,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.872.400,00	
3.	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	121.095.440,00	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	109.568.816,14	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.742.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	17.692.000,00	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	5.400.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	4.200.000,00	
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	14.354.240,00	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	7.604.240,00	
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	187.264.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	110.374.000,00	
8.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	26.370.950,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	21.713.300,00	
9.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	8.457.900,00	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 dok	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Berbasis Elektronik pada SKPD			
VI.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	**313.710.773**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	**313.710.773**	
1.	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	115 unit	27.914.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	9 unit	27.914.000,00	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 unit	285.796.773,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	285.796.773,00	
VII.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**437.465.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**727.487.000**	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	240.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	240.000.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	193.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	483.122.000,00	
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**100%**	**506.098.550**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**100%**	**455.901.350**	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19 unit	159.824.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19 unit	138.912.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.788.500,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.788.500,00	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	107.810.050,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	100.400.050,00	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	227.676.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	205.800.000,00	
B	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar**	**100%**	**538.912.753.000**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar**	**100%**	**538.912.753.000**	
IX	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)**	**100%**	**1.984.440.044**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)**	**100%**	**1.438.930.424**	
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	444.440.730,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	345.044.428,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	454.999.866,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	353.393.816,00	
3.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	469.999.897,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	371.749.230,00	
4.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	514.999.901,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	368.742.950,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	99.999.650,00	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	0	
X	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**762.239.200**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**529.475.050**	
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	364.697.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	277.851.300,00	
2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	122.579.000,00	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	88.807.200,00	
3.	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	78.810.200,00	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	48.323.900,00	
4.	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	37.874.000,00	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	24.679.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	21.659.000,00	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	14.878.250,00	
6.	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	136.620.000,00	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	74.935.400,00	
XI	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	**838.850.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	**615.143.300**	
2.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	81.050.000,00	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	56.833.400,00	
3.	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	96.300.000,00	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	66.981.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000,00	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	455.993.600,00	
5.	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	22.500.000,00	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	14.899.800,00	
6.	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	34.900.000,00	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	54 SKPD 10 Lap	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	20.435.000,00	
XII	**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**432.006.547.586**	**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**481.073.040.631**	
1.	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	382.296.560.186,00	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	397.006.050.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	25.017.000.000,00	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	56.029.100.031,00	
3.	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	24.692.987.400,00	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	28.037.890.600,00	
XIII	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	**94.076.000**	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	**68.160.250**	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	94.076.000,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	68.160.250,00	
XIV	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar**	**100%**	**2.105.000.000**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar**	**100%**	**1.448.186.050**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD**	**100%**	**2.105.000.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Nganjuk**	**Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD**	**100%**	**1.448.186.050**	
1.	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	223.123.000,00	
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	50.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	35.202.800,00	
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	0	
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	500.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	435.493.000,00	
5.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	125.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	88.914.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	575.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	290.117.800,00	
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	155.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	130.295.400,00	
8.	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000,00	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	245.040.050,00	

Keterangan : Hasil Analisis telah dituangkan di aplikasi SIPD RI 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah terhadap RKPD TA 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi keuangan.

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi RKPD(2025)
1.	Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 445.143.449.925

Tabel 3.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Anggaran Sebelum Perubahan/APBD (2025)	Anggaran Setelah Perubahan /PRKPD (2025)
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai standart	100%	459.359.318.679	493.503.256.376

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangasa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromarititm Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah” dan “Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset daerah”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah (menurut Renstra 2024)	Opini atas audit BPK	WTP
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai standar	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel (terlampir pada laporan ini).

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural."**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial Pertanian, Dan Pengembangan Perdagangan Industri Yang Diprioritaskan Berbahan Baku Hasil Pertanian.
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, dan Pariwisata).
3. Pemantapan SDM Berdayasaing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter.
4. Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar.
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian.
6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
7. Nilai-nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan Sebagai Pendukung Investasi Daerah.

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Adil Dan Sejahtera" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

Tabel 3.4

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17)			
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama			
	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah MoU	1	BPKAD

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tabel 3.5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Keuangan			**459.359.318.679**	**493.503.256.376**	**34.143.937.697**	
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah**	**84**	**8.022.124.278**	**8.330.320.671**	**308.196.393**	
I.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**54.567.000**	**45.319.200**	**-9.247.800**	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.185.000	7.290.000	-895.000	Efisiensi Anggaran
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	5.562.000	-2.077.000	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	6.639.000	-1.000.000	Efisiensi Anggaran
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	4.860.000	-597.000	Efisiensi Anggaran
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	4.833.200	-623.800	Efisiensi Anggaran

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok	9.276.000	6.350.000	-2.926.000	Efisiensi Anggaran
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dok	10.914.000	9.785.000	-1.129.000	Efisiensi Anggaran
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.537.703.833**	**6.287.246.650**	**749.542.817**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bln	5.524.062.833	6.275.710.000	751.647.167	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.639.000	7.129.000	-510.000	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	6.002.000	4.407.650	-1.594.350	Efisiensi Anggaran
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi BMD perangkat daerah**	**100%**	**10.831.000**	**9.891.000**	**-940.000**	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pentausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	10.831.000	9.891.000	-940.000	Efisiensi Anggaran
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**519.560.200**	**205.521.050**	**-314.039.150**	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 paket	33.300.000	0	-33.300.000	Efisiensi Anggaran
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	76.287.950	38.143.750	-38.144.200	Efisiensi Anggaran
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	409.972.250	167.377.300	-242.594.950	Efisiensi Anggaran
V	**Administrasi Umum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**100%**	**401.317.922**	**285.243.648**	**-116.074.274**	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.218.892	10.218.892	0	-
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.872.400	3.872.400	0	-
3	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	121.095.440	108.218.816,14	-12.876.624	Efisiensi Anggaran
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.742.000	17.692.000	-15.050.000	Efisiensi Anggaran
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	5.400.000	4.200.000	-1.200.000	Efisiensi Anggaran
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	14.354.240	8.954.240	-5.400.000	Efisiensi Anggaran
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	187.264.000	110.374.000	-76.890.000	Efisiensi Anggaran

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
8	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	26.370.950	21.713.300	-4.657.650	Efisiensi Anggaran
9	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	0	0	0	
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	**313.710.773**	**313.710.773**	**0**	
1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	10 unit	27.914.000	27.914.000	0	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	285.796.773	285.796.773	0	-
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**90%**	**727.487.000**	**727.487.000**	**0**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000	4.365.000	0	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	240.000.000	240.000.000	0	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	483.122.000	483.122.000	0	-
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**100%**	**456.946.550**	**455.901.350**	**-1.045.200**	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19 unit	132.548.000	138.912.800	6.364.800	Pergeseran dari Sub Keg Pemel. Peralatan dan Mesin

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.788.500	10.788.500	0	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	107.810.050	100.400.050	-7.410.000	Pergeseran ke Sub Keg. Pemel. Pajak dan Perizinan kendaraan dinas…
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	205.800.000	205.800.000	0	-
B	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standart**	**100%**	**449.304.644.401**	**483.724.749.655**	**34.420.105.254**	
IX	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)**	**100%**	**1.984.440.044**	**1.438.930.424**	**-545.509.620**	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	444.440.730	345.044.428	-99.396.302	Efisiensi Anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dok	454.999.866	353.393.816	-101.606.050	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	469.999.897	371.749.230	-98.250.667	Efisiensi Anggaran
4	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	514.999.901	368.742.950	-146.256.951	Efisiensi Anggaran

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
5	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	99.999.650	0	-99.999.650	Efisiensi Anggaran
X	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**762.239.200**	**529.475.050**	**-232.764.150**	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	364.697.000	277.851.300	-86.845.700	Efisiensi Anggaran
2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	122.579.000	88.807.200	-33.771.800	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	78.810.200	48.323.900	-30.486.300	Efisiensi Anggaran
4	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	37.874.000	24.679.000	-13.195.000	Efisiensi Anggaran
5	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	21.659.000	14.878.250	-6.780.750	Efisiensi Anggaran

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
6	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	136.620.000	74.935.400	-61.684.600	Efisiensi Anggaran
XI	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	**838.850.000**	**615.143.300**	**-223.706.700**	
1	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 laporan	81.050.000	56.833.400	-24.216.600	Efisiensi Anggaran
2	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	96.300.000	66.981.500	-29.318.500	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000	455.993.600	-148.106.400	Efisiensi Anggaran
4	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan				0	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
5	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	22.500.000	14.899.800	-7.600.200	Efisiensi Anggaran
6	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	34.900.000	20.435.000	-14.465.000	Efisiensi Anggaran
XII	**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**445.625.039.157**	**481.073.040.631**	**35.448.001.474**	
1	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	400.220.205.808	397.006.050.000	-3.214.155.808	Efisiensi Anggaran
2	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	19.413.877.949	56.029.100.031	36.615.222.082	
3	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	25.990.955.400	28.037.890.600	2.046.935.200	
XIII	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	**94.076.000**	**68.160.250**	**-25.915.750**	
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	94.076.000	68.160.250	-25.915.750	Efisiensi Anggaran
C	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100%**	**2.032.550.000**	**1.448.186.050**	**-584.363.950**	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran Sebelum Perubahan/APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan/P.RKPD 2025	Bertambah /Berkurang	Keterangan Perubahan
		Uraian (Output)	Target				
XIV.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**2.032.550.000**	**1.448.186.050**	**-584.363.950**	
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000	223.123.000	-26.877.000	Efisiensi Anggaran
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 dok	50.000.000	35.202.800	-14.797.200	Efisiensi Anggaran
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000	0	-100.000.000	Efisiensi Anggaran
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	600.000.000	435.493.000	-164.507.000	Efisiensi Anggaran
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	125.000.000	88.914.000	-36.086.000	Efisiensi Anggaran
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	402.550.000	290.117.800	-112.432.200	Efisiensi Anggaran
7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi Penilaian BMD	30 laporan	155.000.000	130.295.400	-24.704.600	Efisiensi Anggaran
8	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000	245.040.050	-104.959.950	Efisiensi Anggaran

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah					
	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Umum	396.005.205.808	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Belanja Tidak Terduga		19.936.877.949		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Belanja Bagi Hasil	Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi	25.965.981.800	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
    c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. KEPALA BPKAD
KABUPATEN NGANJUK

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

Paraf Hierarkis			
No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris		26-5-25
2.	Kasubag	-	-
3.	Analis PE		26/5/25